

SKRIPSI

**PERGESERAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAKPIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

Oleh:

IVAN AZIS MUHAMMAD1710113033

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.Lucky

Raspati, S.H., M.H.

Program Kekhususan: Hukum Pidana




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Ivan Azis Muhammad	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar, 02 Januari 1998 b) Nama Orang Tua : Saiful Anwar c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Pidana e) No BP : 1710113033	f) Tanggal Kelulusan : 18 Februari 2021 g) Predikat : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan i) IPK : 3,97 j) Alamat : Jl. Jati Pelalawan, Riau	

PERGESERAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Ivan Azis Muhammad, 1710113033, 119 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021)

ABSTRAK

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu hukum pidana khusus mengalami berbagai pembaruan terhadap upaya untuk menjawab tantangan modus operandi korupsi yang semakin modern. Salah satu pembaruan yang dilakukan adalah dirumuskannya pergeseran sistem beban pembuktian, pada awalnya menganut asas *actori incumbit onus probandi* bergeser ke arah *omkering van het bewijslast/ reversal burden of proof*. Penyimpangan tersebut disinyalir sebagai pertentangan asas *Persumtion of Innoncent* dan asas *Non Self Incrimination* yang merupakan upaya perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa. Pergeseran sistem beban pembuktian sebagai pembaruan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi berimplikasi kepada pembaruan di dalam masyarakat terhadap rekayasa sosial sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh Roescoe Pound *Law as a tool of social engineering*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi pergeseran sistem beban pembuktian yang dikaitkan dengan kedudukannya terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembaruan di dalam masyarakat. Penelitian hukum ini bersifat normatif yang menggunakan sumber data sekunder dengan studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsepsi pergeseran sistem beban pembuktian tersebut tidak sampai kepada pembalikan beban pembuktian yang absolut/murni melainkan hanya sebatas pergeseran "*shifting burden of proof*" yang mengarah kepada pembalikan beban pembuktian *omkering van het bewijslast*. kedudukan *shifting burden of proof* pada sistem peradilan pidana bukanlah pertentangan dengan asas *persumtion of innoncent* dan asas *non self incrimination* yang menjadi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi hanya sebatas pengecualian asas yang sangat terpaksa dilakukan, maka nilai-nilai dari *shifting burden of proof* ke arah *omkering van het bewijslast* dengan perlindungan Hak Asasi Manusia saling bersaing tetapi tidak bertentangan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. sebagai *law reform*, kedudukan *shifting burden of proof* berperan untuk *social engineering* yang dijadikan alat penggerak masyarakat menuju perubahan yang diinginkan, untuk itu pembaruan hukum tindak pidana korupsi yang merupakan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum berorientasi kepada pembaruan di dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Sistem Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi Manusia*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Februari 2021. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

--	--

